

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS SALOTUNGO
KABUPATEN SOPPENG SULAWESI SELATAN
SETELAH BERSTATUS MENJADI BLUD**

SKRIPSI



**OLEH:
NUR ASYRUNI MUHARRAM
N15221083**

**PROGRAM STUDI D4 ANALIS KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS SALOTUNGO
KABUPATEN SOPPENG SULAWESI SELATAN
SETELAH BERSTATUS MENJADI BLUD**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Terapan Kesehatan



**OLEH:
NUR ASYRUNI MUHARRAM
N15221083**

**PROGRAM STUDI D4 ANALIS KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi :

**“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS SALOTUNGO
KABUPATEN SOPPENG SULAWESI SELATAN
SETELAH BERSTATUS MENJADI BLUD”**

**Oleh :
Nur Asyruni Muharram
N15221083**

Surakarta, 3 Juli 2023

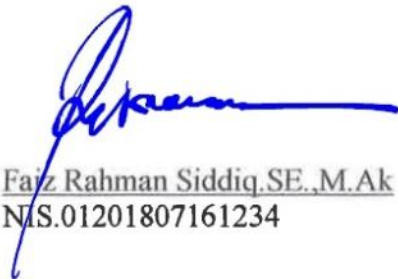
Menyetujui Untuk Ujian Sidang Skripsi,

Pembimbing Utama



Emma Ismawatie, S.S.T., M.Kes
NIDN. 0611107001

Pembimbing Pendamping



Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak
N.I.S.01201807161234

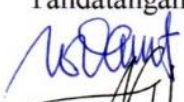



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi :

**“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS SALOTUNGO
KABUPATEN SOPPENG SULAWESI SELATAN
SETELAH BERSTATUS MENJADI BLUD”**

Oleh :
Nur Asyruni Muharram
N15221083

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 5 Juli 2023


	Tandatangan	Tanggal
Penguji I : Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si		14-08-2023
Penguji II : dr.H.RM Narindro Karsanto, MM		10-08-2023
Penguji III : Faiz Rahman Siddiq, SE. ,M.Ak		10-08-2023
Penguji IV : Emma Ismawatie, S.S.T., M.Kes		10-08-2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Setia Budi


Prof. Dr. Marsetyawan HNE S.M.Sc., Ph.D
NIDK. 8893090018

Ketua Program Studi
D4 Analis Kesehatan



Dr. Dian Kresnadipavana, S.Si., M.Si
NIS.01201304161170

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan Setelah Berstatus Menjadi BLUD” adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila skripsi ini merupakan jiplakan dari penelitian/karya ilmiah/skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi, baik secara akademis maupun hukum.

Surakarta, Juli 2023



Nur Asyruni Muharram
Nur Asyruni Muharram
NIM. N15221083

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis perhadapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan Setelah Berstatus Menjadi BLUD”**. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah pengetahuan atau wawasan penulis, terkhusus tentang masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, salah satu alasan penelitian ini dilakukan adalah memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Terapan Kesehatan pada Program Studi D4 Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta.

Penyelesaian tulisan ini telah mendapat banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan. Sehingga dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dukungan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA selaku Rektor Universitas Setia Budi Surakarta.
2. Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta.
3. Dr. Dian Kresnadipayana, S.Si., M.Si selaku Ketua Program Studi D4 Analis Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta.
4. Emma Ismawatie, S.ST., M.Kes selaku dosen Pembimbing Utama Tugas akhir telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak selaku dosen Pembimbing pendamping Tugas akhir yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini.

6. Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si bersama dr. RM Narindro Karsanto, MM selaku tim penguji Tugas akhir yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, serta memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis.
7. Hj. Nirtati, SKM selaku Kepala Puskesmas Salotungo bersama staf yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
8. Sallang, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng bersama Istri Ibu Hajriani, S.Kep., Ns selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Malaka yang telah memberikan dorongan, motivasi dan izin untuk melanjutkan pendidikan.
9. Andi Kaswadi Razak, SE selaku Bupati Soppeng bersama seluruh Pemerintah Daerah yang terlibat dalam pengurusan izin belajar penulis.
10. Anthon Toding, SKM selaku Kepala Puskesmas Malaka yang memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan.
11. Suami tercinta Kamaruddin, Anak tercinta Gina Salwa dan Bagas Abadi, yang selalu memberikan dukungan berupa moril, material dan dorongan secara terus menerus tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Sahabatku Helmiati Hemma, S.Kep., Ns dan Cici Handayani, Amd.Keb yang selalu mensupport memberikan motivasi dan dorongan serta semangat untuk melanjutkan pendidikan.
13. Teman-teman Angkatan 2022 D4 Analis Kesehatan Alih Jenjang Universitas Setia Budi atas segala kerjasamanya, dukungan dan kebersamaan yang terjalin baik suka maupun duka selama menjalani pendidikan.
14. Bapak dan ibu dosen Program Studi Analis Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang dengan tulus ikhlas telah mengulurkan bantuan, masukan dan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulispun menyadari penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena ini, segala saran dan

dan ide lebih lanjut penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin Ya Robbal Alamiin

Surakarta, Juli 2023

Nur Asyruni Muharram

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INITSARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Analisis.....	9
2. Pengelolaan Keuangan.....	9
3. Puskesmas	10
4. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	16
B. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Rancangan Penelitian	27
B. Waktu dan Tempat Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel	27
D. Variabel Penelitian	28

E. Alat dan Bahan.....	28
F. Prosedur Penelitian	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
I. Alur Penelitian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	33
C. Pembahasan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pikir.....	26
Gambar 3.1 : Alur Penelitian.....	31
Gambar 4.1 : Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 : Data Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan.....	5
Tabel 4.1 : Karakteristik Responden di Puskemas Salotungo Kabupaten Soppeng (N=4).....	34
Tabel 4.2 : Analisis Keuangan Berdasarkan 10 Fleksibilitas Tata Kelola BLUD.....	35

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BLU	Badan Layanan Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
KAP	Kantor Akuntan Publik
LKJIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PEMDA	Pemerintah Daerah
PNPB	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PONED	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PPK	Pola Pengelolaan Keuangan
PPKD	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah
RBA	Rencana Bisnis Anggaran
RKPBMD	Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	Standar Operasional Prosedur
UGD	Unit Gawat Darurat
UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	Upaya Kesehatan Perseorangan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan Izin Pengambilan Data dan Wawancara
Lampiran 2	Daftar Istilah
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6	Laporan Keuangan

INTISARI

Muharram, N.A. 2023. Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan Setelah Berstatus Menjadi BLUD. Program Studi D4 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Setia Budi.

Puskesmas merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan puskesmas, maka puskesmas harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran. Pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan setelah berstatus menjadi BLUD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah Kepala Puskesmas dan Pejabat Keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan dengan jumlah sampel sebanyak 4 orang menggunakan teknik sampel jenuh. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan setelah berstatus menjadi BLUD diatur berdasarkan peraturan daerah. Namun dalam penerapannya terdapat 3 fleksibilitas tata kelola BLUD menurut Permendagri No. 79 tahun 2018 meliputi kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan investasi, dan sistem remunerasi belum terlaksana dengan baik. Kendala dalam pengelolaan keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan setelah berstatus menjadi BLUD adalah tidak cukupnya anggaran, karena tidak ada lagi Dana Alokasi Umum dari APBD Pemerintah Daerah, serta masih ada beberapa fleksibilitas yang belum diatur oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng membuat puskesmas tidak dapat melaksanakan fleksibilitas BLUD secara maksimal.

Kata kunci: pengelolaan keuangan, puskesmas, BLUD

ABSTRACT

Muharram, N.A 2023. Analysis of Financial Management of the Salotungo Health Center, Soppeng Regency, South Sulawesi After Becoming a BLUD Status. Bachelor's degree Program in Medical Laboratory Technology, Health Sciences Faculty, Setia Budi University.

Community health centers are the spearhead of providing services to the community. To improve puskesmas services, puskesmas must have broader authority in managing income and expenses. The most appropriate pattern for this is the Financial Management Pattern for the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD). The purpose of this study was to analyze the financial management of the Salotungo Health Center in Soppeng Regency, South Sulawesi after becoming a BLUD status.

This study used a qualitative approach. The population of this study were the Head of the Health Center and Finance Officers of the Salotungo Health Center, Soppeng Regency, South Sulawesi with a total sample of 4 people used a total sample technique. Data analysis techniques in this study used data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the financial management of the Salotungo Health Center in Soppeng Regency, South Sulawesi, after becoming a BLUD, was regulated based on regional regulations. However, in its implementation, there are 3 flexibility of BLUD governance according to Permendagri No. 79 of 2018 covers cooperation with other parties, investment management, and the remuneration system has not been implemented properly. The obstacle in managing the finances of the Salotungo Health Center in Soppeng Regency, South Sulawesi, after becoming a BLUD, was the insufficient budget, because there was no longer a General Allocation Fund from the Local Government APBD, and there was still some flexibility that had not been regulated by the Soppeng Regency Government has prevented the puskesmas from implementing the maximum flexibility of the BLUD.

Keywords: financial management, health center, BLUD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang fokus pada penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat serta layanan kesehatan individu tingkat pertama, dengan penekanan lebih pada aspek pencegahan dan promosi kesehatan di wilayah kerjanya. Di Puskesmas, pelayanan kesehatan ditekankan pada populasi luas dengan tujuan mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Puskesmas diharapkan memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, dan juga diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan di daerah setempat.

Untuk mengetahui sifat administrasi di Puskesmas, penting untuk memperluas ahli dalam mengawasi bagian gaji dan biaya. Metodologi yang paling tepat untuk hal ini adalah Contoh Penatausahaan Keuangan Lembaga Bantuan Publik Daerah (PPK-BLUD). Dengan memanfaatkan Contoh Penatausahaan Keuangan Lembaga Bantuan Masyarakat Propinsi, Puskesmas dapat memiliki keahlian yang lebih menonjol dalam mengawasi Pembayaran Negara Non Penilaian (PNPB), yaitu pembayaran khusus yang diterima

langsung dari administrasi kepada pasien, tanpa harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara. Instrumen ini pada dasarnya akan membantu Puskesmas dalam memenuhi kebutuhan seperti pembelian obat-obatan, pembiayaan operasional, dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran yang ada. Tanpa adanya kemampuan fleksibilitas seperti ini, Puskesmas mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan unggul pada era BPJS. Pasalnya, sistem dalam BPJS mengadopsi metode kapitasi, di mana pembayaran dilakukan secara bulanan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Pembayaran ini didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar, tanpa mempertimbangkan jenis dan jumlah layanan kesehatan yang diberikan. (Sabardiman et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara membuka peluang baru untuk mengimplementasikan pendekatan berbasis kinerja di sektor pemerintahan. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 undang-undang ini, instansi pemerintah yang paling intinya menyediakan layanan kepada masyarakat diberikan keleluasaan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, dengan pemberian fokus pada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Entitas pemerintah semacam ini, yang lebih dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan dapat memberikan contoh konkret dalam penerapan manajemen keuangan yang menekankan hasil atau kinerja. Konsep Badan Layanan Umum Daerah juga merupakan hasil dari upaya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu elemen dari reformasi tersebut adalah pergeseran dari pendekatan

anggaran tradisional yang hanya menitikberatkan pada pembiayaan masukan (input) atau proses, menuju anggaran yang lebih fokus pada hasil atau kinerja.

Badan Bantuan Umum Daerah (BLUD) yang juga sering disingkat menjadi BLUD ini penting bagi suatu yayasan pemerintah daerah yang dibentuk dengan maksud sepenuhnya untuk menawarkan jenis-jenis bantuan kepada daerah sebagai barang atau jasa yang dijual tanpa berfokus pada tujuan untuk menciptakan suatu memperoleh. Dalam menyelesaikan kewajibannya, BLUD mengacu pada standar kecakapan dan efisiensi (Herawati et al., 2022). Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, dimaknai bahwa BLUD merupakan kerangka kerja yang memiliki daya adaptasi dalam pengawasan dana dengan menerapkan standar usaha yang sehat, dan dapat dianut oleh Unit Pelaksana Khusus Wilayah (UPTD) atau organisasi provinsi untuk menawarkan jenis bantuan. ke daerah setempat.

Mengubah status dari non-BLUD menjadi BLUD pada dasarnya mencerminkan sebuah transformasi dalam struktur organisasi. Transformasi dalam konteks organisasi memiliki nilai positif, karena tanpa perubahan, organisasi dapat menjadi stagnan. Asosiasi yang dapat bertahan dalam jangka panjang adalah yang bersifat dinamis, atau paling tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Aturan ini juga berlaku untuk administrasi seluruh asosiasi (Maduratna et al., 2022).

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Rawung (2016), tercatat adanya peningkatan kinerja setelah periode dua setengah tahun menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Dalam konteks ini, aspek keuangan menunjukkan nilai kinerja rata-rata yang lebih rendah jika dibandingkan dengan aspek pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Perbandingan hasil antara obyek penelitian dan puskesmas yang belum menerapkan PPK BLUD mengindikasikan pencapaian kinerja yang lebih baik pada puskesmas yang telah mengadopsi PPK BLUD. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati & Sunaningsih (2023), ditemukan bahwa puskesmas yang mengalami transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan kemampuan yang lebih fleksibel dalam hal pendapatan, pengelolaan pengeluaran, proses pengadaan barang dan jasa, kolaborasi dengan pihak lain, serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Selain itu, puskesmas yang telah beralih ke status BLUD juga telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan, yang membantu mengatur manajemen keuangan dengan lebih terstruktur.

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 110 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2019, mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah untuk unit pelaksana teknis daerah di puskesmas yang berada di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Soppeng terdapat 17 puskesmas, dimana BLUD Puskesmas dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 16 Desember 2019 terdapat 6 Puskesmas berubah status menjadi BLUD, sedangkan tahap kedua

pada tanggal 27 Januari 2021 adalah 11 Puskesmas yang berubah status menjadi BLUD.

Tabel 1.1 Data Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan

Nama Puskesmas	APBD BLUD 2022	Pendapatan BLUD 2022	SiLPA BLUD 2022
Puskesmas Tanjonge	1.728.000.000.00	1.101.000.000.00	80.239.116.50.00
Puskesmas Takalala	1.995.762.764.00	713.019.160.00	8.402.247.00
Puskesmas Cangadi	1.770.471.783.00	543.018.354.00	5.394.120.00
Puskesmas Cabenge	447.138.720.00	1.100.708.224.00	52.146.821.00
Puskesmas Pacongkang	1.128.448.620.00	404.962.193.00	5.910.626.00
Puskesmas Batu-Batu	1.138.717.063.00	1.102.717.063.00	11.079.670.25.00
Puskesmas Goarie	1.102.314.917.00	200.845.180.00	13.601.939.00
Puskesmas Citta	735.720.399.00	509.486.405.00	648.462.00
Puskesmas Baringeng	1.315.370.353.00	374.482.750.00	48.185.333.68.00
Puskesmas Cakkuridi	729.509.559.00	729.509.559.00	6.558.457.74.00
Puskesmas Salotungo	2.100.460.060.00	1.106.625.330.00	17.909.887.00
Puskesma Malaka	1.142.374.004.00	1.101.374.004.00	152.124.246.00
Puskesmas Sewo	1.122.787.302.00	1.103.787.302.00	39.187.171.00
Puskesmas Tajuncu	1.937.219.220.00	94.849.220.00	150.740.107.00
Puskesmas Leworeng	847.055.567.00	847.055.567.00	5.345.672.00
Puskesmas Panincong	1.100.735.695.00	1.100.735.695.00	3.158.859.00
Puskesmas Ganra	991.837.521.00	991.837.521.00	7.049.149.00

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng 2023

Setelah melewati evaluasi terhadap persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dinilai oleh tim penilai dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Puskesmas Salotungo resmi diumumkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Keputusan ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No. 803/XII/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2019 (lihat SK terlampir). Puskesmas Salotungo merupakan puskesmas utama yang terletak di pusat Kota Soppeng. Puskesmas ini memiliki empat wilayah kerja, yakni Kelurahan Lemba, Kelurahan Lalabatarilau, Botto, dan Desa Maccile. Puskesmas Salotungo berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup perawatan, dengan kapasitas 9 tempat tidur untuk

rawat inap, 2 tempat tidur untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), serta 2 tempat tidur untuk Unit Gawat Darurat (UGD).

Berdasarkan laporan tahunan Puskesmas Salotungo tahun 2022, sumber daya yang tersedia di Puskesmas tersebut terdiri dari: 2 dokter umum, 2 dokter gigi, 8 bidan, 12 perawat, 1 ahli gizi (nutrisionis), 1 analis kesehatan, 1 ahli sanitasi (sanitarian), 1 asisten apoteker, 1 apoteker, 1 perawat gigi, dan 4 staf non-medis.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD mengharuskan puskesmas untuk menjalankan dua peran, yaitu peran sosial dan peran ekonomi. Selain memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari peran sosial, puskesmas juga diwajibkan untuk melakukan aktivitas bisnis yang sehat secara mandiri. Aktivitas bisnis ini harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta akan diaudit secara berkala oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ghany, 2019).

Para ahli berkeinginan untuk melakukan kajian di Balai Kesehatan Salotungo karena berdasarkan Laporan Pelaksanaan Lembaga Kejaksaan (LKJIP) Dinas Kesra Soppeng tahun 2022, data menunjukkan bahwa Balai Kesehatan Salotungo memiliki nilai tertinggi. angka pendapatan rencana pengeluaran di antara 16 Komunitas Kesejahteraan lainnya yang melaksanakan program peningkatan administrasi kesejahteraan BLUD. Pusat Kesejahteraan Salotungo menyalurkan rencana keuangan sebesar

2.100.460.060,00 dari APBD, dengan penerimaan dari APBD sebesar 1.106.625.330,00 dan kelebihan SiLPA sebesar 17.909.887,00.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menjalankan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan Setelah Berstatus Menjadi BLUD”

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan setelah berstatus menjadi BLUD?
2. Apakah ada kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan setelah berstatus menjadi BLUD?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan setelah berstatus menjadi BLUD.
2. Untuk mengidentifikasi adanya kendala-kendala pengelolaan keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan setelah berstatus menjadi BLUD.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang signifikan, terutama dalam mengembangkan basis pengetahuan. Hasilnya diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber bacaan atau referensi yang memberikan wawasan teoritis dan empiris bagi pihak-pihak yang berencana untuk melakukan penelitian lanjutan terkait masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi sumber-sumber literatur yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan manfaat yang nyata, terutama bagi Pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi input berharga dan panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan arah dan merancang strategi yang efektif dalam pengelolaan keuangan setelah mengadopsi status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).